



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian
Kementerian Pertanian

LAPORAN TAHUNAN PPID 2020



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Laporan pengelolaan keterbukaan informasi dan dokumentasi atau PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) tahun 2020 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, pemangku kepentingan dan sebagai bahan dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian di era keterbukaan.

Keterbukaan informasi publik (KIP) membuka kran akses sebesar besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Laporan keterbukaan informasi publik tahun 2020, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) lebih informatif dalam menyajikan isi laporan sehingga lebih mudah dipahami pembaca. Selain berupa infografis juga berisi uraian informasi sesuai dengan format penyajian laporan.

Kami menyadari bahwa laporan dan keterbukaan informasi publik ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Sehingga kami mengharapkan saran dan masukan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini. Besar harapan kami, semoga laporan keterbukaan informasi publik tahun 2020 ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 31 Desember 2020
Kepala Bag. Evaluasi dan Pelaporan
Selaku PPID Pelaksana BPPSDMP



Dr. Ir. Suhirmanto, M. Si
NIP. 19640511198903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
1.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik.....	1
1.2 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	2
II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
2.1 Penyediaan Akses Informasi Publik.....	3
2.2 Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM)	4
2.3 Daftar PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Pusat dan UPT BPPSDMP.....	5
2.4 Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan.....	7
III. PEMGELOLAAN PELAYANAN DAN DOKUMENTASI	
3.1 Pengumpulan DAN Pengelolaan Dokumentasi.....	11
IV. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI.....	11
V. RENCANA TINDAK LANJUT.....	13
VI. PENUTUP.....	13
VII. LAMPIRAN LAPORAN TAHUNAN PPID UPT LINGKUP BPPSDMP	

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPPSDMP

1.1 *Gambaran Umum Layanan Informasi Publik*

Perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari yang bersifat kepentingan internal dan birokrasi menjadi kepentingan eksternal atau masyarakat, menjadi agenda utama pemerintah. Jika dahulu di dalam sebuah pemerintahan lebih berpusat pada sisi birokrasi (*supply side*), maka saat ini bergeser ke arah masyarakat (*demand side*), sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan menjadi semakin tinggi.

Isu-isu seperti: demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), hukum, transparansi, korupsi, *civil society*, *good corporate governance*, perdagangan bebas, pasar terbuka dan lain sebagainya menjadi pemicu perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui berbagai langkah dan kebijakan, salah satunya melalui kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan kepada setiap badan publik dan lembaga negara untuk mengelola dan membuka informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Kewajiban badan publik untuk membuka informasi kepada masyarakat karena dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya menggunakan dana yang berasal dari APBN, APBD. Dana yang berasal dari hibah dan sumbangan luar negeri.

Tuntutan akan keterbukaan informasi di badan publik sejalan dengan tujuan KIP yaitu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi

dan supremasi hukum dengan keterlibatan masyarakat pada setiap proses pengambilan kebijakan suatu Badan Publik.

BPPSDMP sebagai salah satu badan publik Eselon I Kementerian Pertanian memiliki peran untuk mendukung terwujudnya kesuksesan pembangunan pertanian melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakannya, BPPSDMP perlu melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan masyarakat dalam memperoleh informasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka keterbukaan informasi tersebut, BPPSDMP telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dibantu oleh PPID Pembantu Pelaksana lingkup Pusat dan UPT untuk melakukan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

1.2 *Kebijakan Pelayanan Informasi Publik*

Kebijakan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman UjiKonsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 70/Kpts/HM.110/I/04/19 tentang PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP.

II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Penyediaan Akses Informasi Publik

Untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengakses informasi publik di BPPSDMP, PPID Pelaksana BPPSDMP mengoptimisasi website sebagai sarana penyediaan informasi publik yang dapat di akses masyarakat sebagai berikut:

1. Website BPPSDMP: bppsdp.pertanian.go.id.
2. Portal Pusat Penyuluhan Pertanian: cybex.pertanian.go.id;
3. Portal PPID BPPSDMP: ppid.bppsdp.pertanian.go.id
4. Perpustakaan BPPSDMP: <http://lib.bppsdp.pertanian.go.id>
5. Portal Berita Pertanian BPPSDMP : <http://sdmbertani.id>

2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, BPPSDMP menunjuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP melalui Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor: 70/Kpts/HM.110/I/04/19 tentang PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup BPPSDMP mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi public secara cepat, tepat dan sederhana;
- 2) Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi public secara cepat, tepat dan sederhana;
- 3) Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi publik;
- 4) Menerbitkan Daftar Informasi Publik;
- 5) Menyiapkan saran, tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa informasi publik;
- 6) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- 7) Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;

8) Menyusun laporan berkala kepada PPID Kepala BPPSDMP

Sedangkan PPID Pembantu Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- 2) Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
- 3) Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa informasi publik;
- 4) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- 5) Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.

2.3 Daftar PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Pusat dan UPT BPPSDMP Sesuai SK Kepala Badan PPSDMP No. 70/Kpts/HM.110/I/04/19.

No	Unit Kerja	PPID Pelaksana	PPID Pembantu Pelaksana
1	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha
2	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	Kepala Bagian Umum	Pengelola Kehumasan
3	Politeknik Pembangunan Pertanian Jogya	Kepala Bagian Umum	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
4	Politeknik Pembangunan Pertanian Magelang	Kepala Bagian Umum	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
5	Politeknik pembangunan Pertanian Gowa	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian SDM dan Tata Usaha
6	SMK-PP Negeri Sembawa	Kasubag Tata Usaha	Pembantu Administrasi Humas
7	SMK-PP Negeri Kupang	Wakasek Humas	Staf Pelaksana Humas
8	SMK-PP Negeri Banjarbaru	Kasubag Tata Usaha	Bagian Administrasi Umum

9	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha
10	Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha
11	Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
12	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara	Kepala Bagian Umum	Analisis Kepegawaian
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
14	Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu	Kepala Bagian Umum	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
15	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
18	Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung	Ka. Subbag Tata Usaha	Pranata Komputer
19	Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pengelola Ketatausahaan
20	Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang	Kepala Bagian Umum	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga

2.4 Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi BPPSDMP telah dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja BPPSDMP Tahun Anggaran 2020.

Pada Tahun 2020, PPID Pelaksana BPPSDMP telah melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagai berikut:

1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PPID yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah Pertemuan Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup BPPSDMP dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPSDMP yang diselenggarakan di Hotel Santika Banyuwangi, Jawa Timur dengan tema “Penguatan dan Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID Lingkup BPPSDMP Mendukung Kostratani” yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Koordinasi Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) lingkup BPPSDMP dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPSDMP sebagai berikut:

A. Hari Pertama Rabu, 4 Maret 2020

Kegiatan diawali dengan pembacaan Laporan Ketua Panitia kegiatan Workshop Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi Lingkup Pusat dan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yaitu Plt. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Acara dilanjutkan dengan arahan dan penyampaian materi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi.

B. Hari Kedua Kamis, 5 Maret 2020

Study Tiru ke PPID Dinas Kominfo, Kab. Banyuwangi

1. Lokasi Kunjungan Pertama (Mall Layanan Publik)

- Kunjungan ke Mall Layanan Publik Kab. Banyuwangi
- Mall Layanan Publik ini adalah layanan satu pintu dalam mengurus hal terkait pelayanan ada 213 layanan (Layanan Pemerintah Daerah dan Layanan Pemerintah Pusat).
- Koordinator dari Mall Layanan Publik adalah Dinas Perizinan.
- Kios Perizinan adalah Pengelolaan Perizinan yang dimiliki oleh masing-masing dinas yang berkumpul bersama di Mall Pelayanan Publik
- Motto Pelayanan Lebih Cepat Lebih Baik”.
- Proses pembayaran (Biaya) sudah melakukan sistem online (Tidak ada transaksi

Tunai)

- Pelayanan semua yg dikelola oleh Sistem
- Jam layanan 07.00 - 15.30 Senin. - jumat
- Unit Pemerintah Pusat diantaranya: BPOM, Imigrasi, Kementerian Agama, Kepolisian, PLN, Kantor Pos, BPS, BPJS dll. Ada 12 layanan Pemerintah Pusat

2. Lokasi Kedua (PPID Kab. Banyuwangi yang dikelola oleh Dinas Kominfo dan Persandian.

- Peserta Workshop PPID disambut oleh Sekretaris Dinas Kominfo
- View video profil Kab. Banyuwangi
- Pengelolaan informasi publik oleh Dinas Kominfo merupakan Kumpulan Data dari Tingkat Desa dan Kecamatan.
- Data berkembang Real Time.
- Tujuannya agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi
- Masyarakat juga dapat memantau informasi kegiatan pemerintah kabupaten
- Kominfo tugasnya menyiapkan infrastruktur IT bagi unit kerja pemkab/OPD.
- Aplikasi Web Smart Kampung adalah agar masyarakat bisa mengakses informasi kebutuhan masyarakat dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat.
- PPID Banyuwangi mendapatkan penghargaan PPID terbaik se Jawa timur berturut-turut 4 kali.
- Penghargaan Kabupaten terinovatif dan terbuka
- PPID Banyuwangi menjadi percontohan PPID pusat atau KIP.
- Sistem informasi pelayanan publik diakomodir oleh Portal Khusus PPID Kab. Banyuwangi.
- PPID Banyuwangi adalah PPID yang mendapatkan sengketa IP paling banyak di lingkup kab/kota alasannya karena informasi yang begitu terbuka. ini adalah dasar pembelajaran untuk terus memperbaiki pengelolaan PPIDnya.
- LSM adalah yang paling banyak melakukan pengaduan dan mengajukan sengketa informasi publik
- Semakin baik PPIDnya maka akan semakin banyak akses masyarakat terhadap informasi terkait pemerintahan Kab. Banyuwangi.
- Meninjau front desk PPID dan sekretariat PPID Kab. Banyuwangi

3. Kunjungan di Lounge pemda Kab. Banyuwangi

- Pertemuan di sambut oleh sekda dan sekretaris dinas
- Pemda menampilkan informasi terkait data potensi kab. Potensi dgn aplikasi2 yg

dimilikinya.

- Kunjungan meninjau CCTV room yang memantau kondisi jalanan/ persimpangan jln kota. Tujuannya utk memudahkan bupati memantau situasi lingkungan sehingga jika ada masalah dilapangan bs segera ditindak lanjuti. Sistem ini bs dipantau melalui android.
- Dalam sambutannya sekda menyampaikan bahwasannya pemda banyuwangi merasa senang atas kepwcayaan rombongan kementan dlm rangka studi tiru...harapannya dlm kunjungan ini ada yg bs ditularkan atau bs dibagi juga hal2 yg baik yg bs diterapkan di instansinya.

C. Hari Ketiga jum'at, 6 Maret 2020

Perumusan Pertemuan Kegiatan Workshop PPID lingkup BPPSDMP dan dilanjutkan dengan penutupan kegiatan oleh plt Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 6 Maret 2020 di Hotel Santika Banyuwangi. Workshop PPID dipimpin dan dibuka oleh Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang diwakili oleh Kepala Bagian Perencanaan BPPSDMP, serta dihadiri oleh perwakilan PPID dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPSDMP. Acara ini menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dan Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang.

Workshop ini juga melakukan kegiatan studi tiru (*Benchmarking*) ke Kantor Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian serta Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi yang mendapatkan penghargaan PPID Terbaik se-Jawa Timur sejak tahun 2013 s.d. 2019.

Kegiatan workshop ini menghasilkan rumusan dan rencana tindak lanjut yang wajib diterapkan di masing-masing UPT sebagai berikut:

1. Membangun komitmen pimpinan beserta jajarannya di unit kerja masing-masing untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan PPID
2. Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan PPID sesuai yang dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 14 tahun 2008
3. Membuat dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan PPID sesuai dengan kebutuhan di masing-masing unit kerja
4. Menyediakan dan mengaktifkan fungsi *front desk* sebagai pintu awal layanan PPID
5. Menyediakan formulir permohonan informasi bagi pemohon informasi

6. Membuat daftar informasi publik untuk mempermudah petugas PPID menemukan informasi yang dibutuhkan.
7. Memberikan pembekalan kepada petugas *front desk* dan satpam tentang SOP pelayanan publik
8. Melaksanakan koordinasi antar seksi atau bagian di dalam unit kerja guna proses updating database kegiatan
9. Mengintegrasikan layanan publik secara online dengan website unit kerja untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat
10. Mengunggah seluruh dokumen informasi publik sesuai amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
11. Berkomitmen untuk menyusun laporan bulanan dan tahunan PPID dan melaporkannya tepat waktu

III. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA HAMBATANNYA

3.1 Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Kegiatan pengumpulan dokumen informasi publik oleh PPID Pelaksana diupayakan dengan menghimpun seluruh dokumen informasi publik yang ada di pusat maupun yang ada di Unit Kerja Eselon 2 Pusat lingkup BPPSDMP. Dokumen tersebut seperti: Renstra Badan dan Pusat, Laporan Keuangan, indeks kepuasan masyarakat, capaian kinerja, LAKIN, laporan tahunan, laporan bulanan, materi publikasi tercetak dan digital (leaflet, brosur, buku, video) Sementara itu kegiatan dokumentasi informasi public dilakukan dengan melakukan scan dokumen informasi publik.

IV. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

4.1 Pelayanan Informasi Publik

Untuk memberikan kemudahan bagi Pemohon Informasi mendapatkan informasi publik, PPID Pelaksana BPPSDMP menyelenggarakan pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung. Pelayanan Langsung yaitu; Pemohon Informasi secara langsung mendatangi Ruang Unit Pelayanan Informasi Publik BPPSDMP di Gedung D, Lantai VII, Bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk memohon informasi.

Sedangkan Pelayanan Tidak Langsung adalah Pemohon Informasi yang bilamana ingin memperoleh informasi dapat menggunakan media penyampaian informasi yang disediakan oleh PPID Pelaksana BPPSDMP diantaranya sebagai berikut:

- Website: bppsdp.pertanian.go.id

- Email: humassdm@gmail.com;
- Telepon/faks: (021) 780 4257;
- Pos Surat ditujukan ke Sekretariat Badan Lantai VI, Gedung D, BPPSDMP;
- Aplikasi Layanan SMS Center ditujukan ke Nomor 0813 83 03 44 44;
- Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- Melalui PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Bagi Pemohon Informasi Publik yang ingin memperoleh informasi di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, PPID menetapkan jadwal pelayanan informasi selama 5 hari kerja (Senin-Jumat):

Hari Senin – Kamis: Jam 09.00 - 16.00 WIB

(ISHOMA Jam 12.00-13.00 WIB)

Hari Jumat : Jam 09.00 - 16.00 WIB

(ISHOMA Jam 11.00 - 13.00 WIB)

4.2 *Penyelesaian Keberatan dan Tanggapan Keberatan* Tidak ada keberatan atas informasi publik

4.3 *Penyelesaian Sengketa Atas Informasi Publik* Tidak ada Sengketa Atas Pemberian Informasi Publik

4.4 *Kendala Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi*

Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkup BPPSDMP adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkup BPPSDMP;
- Kurangnya koordinasi antara PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP;
- Belum optimalnya updating informasi berkala di website BPPSDMP;
- Belum optimalnya updating informasi publik di Portal PPID BPPSDMP;
- Belum dikelolanya informasi publik secara baik;
- Kurangnya petugas yang mendokumentasikan informasi publik;
- Belum optimalnya kegiatan pendokumentasian informasi publik dalam bentuk soft copy;
- Belum optimalnya penerapan Aplikasi SILAYAN On-Line;
- Belum memadai anggaran di Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPSDMP untuk mendukung kegiatan layanan informasi public.

V. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP, pada Tahun 2020 PPID Pelaksana BPPSDMP akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan ruangan Unit Layanan Informasi Publik sebagai pusat informasi dalam mendukung kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- b) Melaksanakan kegiatan Pertemuan Koordinasi PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup BPPSDMP;
- c) Menghimpun dokumen-dokumen informasi publik yang kemudian disimpan dalam bentuk soft copy;
- d) Menghimpun Daftar Informasi Publik yang dikuasai Lingkup Pusat BPPSDMP;
- e) Melakukan updating informasi berkala kedalam website;
- f) Menyusun publikasi dalam bentuk poster dan leaflet PPID;
- g) Melakukan pendampingan PPID lingkup UPT BPPSDMP;

VI. PENUTUP

Sejak pertama kalinya disosialisasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, BPPSDMP terus berupaya untuk mengimplementasikan UU KIP dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2020, capaian kinerja PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana BPPSDMP sebagai berikut:

1. Pengumpulan dokumen informasi publik lingkup Pusat dan UPT BPPSDMP
2. Scanning dokumen informasi publik
3. Upload E Dokumen di Portal PPID BPPSDMP yang meliputi data Anggaran, Program, Kinerja, Laporan Informasi Publik, LHKPN dan Regulasi
4. Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi BPPSDMP

Dengan beberapa capaian tersebut, PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi agar lebih baik lagi di tahun mendatang.

Rekap Penolakan Informasi Publik Tahun 2020

No.	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik
1	0	0	0	0	0

Rekap Perpanjangan Informasi Publik Tahun 2020

No .	Tanggal Perpanjangan	No Perpanjangan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tanggal Perpanjangan Hingga	Perpanjangan Ke
1	0	0	0	0	0	0	0

Rekap Pemberitahuan Informasi Publik Tahun 2020

No.	Tanggal Pemberitahuan	No Pemberit	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik							
					Informasi	Pengusaa	Bentuk Informasi	Biaya	Metode	Waktu	Nomor	Notes
1	Senin, 20 Jan 2020	202001200 001/F3- 1/01/2020	Aldo Febrari Hutabarat	perorangan	Jumlah Penyuluh Pertanian di seluruh Provinsi Indonesia tahun 2014 -	tersedia di badan publik lain :		0.00	dikirim melalui email	53 Hari, 18 Jam, 21 Menit		ASlm wr wb.. Mhn maaf baru menjawab. terkait permohonan data penyuluh bapak bs akses website cyber extension. data penyuluh seluruh
2	Senin, 10 Feb 2020	202002100 001/F3- 1/02/2020	Tutut Ferdiana Mahita Paksi	perorangan	keputusan menteri pertanian no 1655/kpts/ot. 160/12/ tahun 2008 tentang Komisi Penyuluhan	info tersedia di ppid		0.00	dikirim melalui email	5 Hari, 23 Jam, 42 Menit		Hasil koordinasi degan Pusat Penyuluhan Pertanian Terkait Keputusan menteri pertanian no 1655/kpts/ot.160/12/ tahun 2008 tentang Komisi Penyuluhan
3	Kamis, 19 Mar 2020	202003190 001/F3- 1/03/2020	Setiyo Budi	perorangan	jumlah penyuluh pertanian PNS di Kabupaten Blora terbaru	info tersedia di ppid	Softcopy	0.00	dikirim melalui email	17 Jam, 31 Menit		ASlm wr wb. Terkait permohonan informasi data penyuluh. mhn bisa akses link ini https://app2.pertanian
4	Selasa, 04 Aug 2020	202008040 001/F3- 1/08/2020	Suyitno	perorangan	Rekap mahasiswa Polbangtan se-Indonesia Tahun 2019/2020	tersedia di badan publik lain :		0.00	dikirim melalui email	11 Hari, 23 Jam, 22 Menit		Kepada Yth, Bpk. Suyitno Aslm Wr Wb. terkait permohonan data Mahasiswa Polbangtan Se Indonesia Tahun 2019/2020. Kami sudah sampaikan kepada
5	Minggu, 08 Nov 2020	202011080 001/F3- 1/11/2020	Robiatun Qomariyah	perorangan	Ada atau tidaknya program PWMP (penumbuhan wirausaha muda pertanian)	info tersedia di ppid		0.00	dikirim melalui email	12 Hari, 18 Jam, 7 Menit		JAWABAN ATAS PERTANYAAN TENTANG PWMP Atas nama : Robiatun Qomariyah Alamat : Desa Kemukten, 01/05, Kecamatan Kersana, Brebes, Jawa Tengah

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik BPPSDMP Tahun 2020

NO	TANGGAL PERMOHONAN	TANGGAL SELESAI PERMOHONAN	NO PENDAFTARAN	NAMA PEMOHON	TIPE PERMOHONAN	INFORMASI PUBLIK		TINDAK LANJUT	STATUS
						Nama Info	Alasan		
1	Jumat, 31 Jan 2020	Senin, 10 Feb 2020	2020013101/F1A-0.I/01/2020	Tutut Ferdiana Mahita Paksi	Perorangan	Nama Info	Alasan	1Pemberitahuan 202002100001/F3-I/02/20202020-02-10 09:25:03	Telah Selesai Diproses
						keputusan menteri pertanian no 1655/kpts/ot.160/12/ tahun 2008 tentang Komisi Penyuluhan Nasional	Guna keperluan penelitian thesis. Jika ada perubahan peraturan/keputusan mohon pemberitahuannya. Terimakasih		
2	Rabu, 18 Mar 2020	Kamis, 19 Mar 2020		Setiyo Budi	Perorangan	Nama Info	Alasan	1Pemberitahuan 202003190001/F3-I/03/20202020-03-19 07:39:08	Telah Selesai Diproses
						jumlah penyuluh pertanian PNS di Kabupaten Blora terbaru	untuk Skripsi		
3	Jumat, 17 Jul 2020	Selasa, 04 Aug 2020	2020071701/F1A-LY.I/07/2020	Suyitno	Perorangan	Nama Info	Alasan	1Pemberitahuan 202008040001/F3-I/08/20202020-08-04 10:26:34	Telah Selesai Diproses
						Rekap mahasiswa Polbangtan se-Indonesia Tahun 2019/2020	Riset		
4	Rabu, 21 Oct 2020	Minggu, 08 Nov 2020	2020102101/F1A-0.I/10/2020	Robiatun Qomariyah	Perorangan	Nama Info	Alasan	1Pemberitahuan 202011080001/F3-I/11/20202020-11-08 08:20:20	Telah Selesai Diproses
						Ada atau tidaknya program PWMP (pembinaan wirausaha muda pertanian) untuk 2021	Banyak peminat yang ingin mendaftar namun belum ada kepastian Informasi dari kementerian		

Rekap Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 20220

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	1	0	0	0	1	0
2	February	1	0	0	1	0	0
3	March	1	1	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	0	0	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	1	0	0	0	1	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	1	0	0	0	1	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		5	1	0	1	3	0

